

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia usaha dan industri semakin meningkat dewasa ini. Hal ini ditandai dengan munculnya persaingan dan berbagai tantangan yang semakin kompleks. Dunia usaha khususnya sektor usaha kecil, mikro dan menengah menjadi salah satu potensi yang harus dikembangkan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dengan peningkatan dan pemerataan hidup masyarakat. Namun, salah satu masalah yang menjadi penghambat adalah jumlah modal yang dimiliki oleh para pelaku usaha untuk lebih menstabilkan dan meningkatkan eksistensi usahanya.

Bagi sebagian besar kalangan unit usaha kecil dan mikro, perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya masih dianggap sangat sulit diakses. Untuk dapat memperoleh kredit, perbankan atau lembaga keuangan lainnya dianggap masih menetapkan persyaratan yang mengikat dan prosedur yang tidak mudah.

Untuk memenuhi syarat agar bankable, para pelaku usaha kecil dan mikro masih dihadapkan pada kendala untuk menyediakan kewajiban agunan atau jaminan kredit yang cukup. Sedangkan dari sisi perbankan, sangat sulit untuk menjangkau kalangan unit usaha kecil dan mikro sebagai sasaran kredit karena minimnya informasi mengenai kinerja dan kemampuan para pelaku usaha kecil dan mikro serta asas kehati-hatian yang menjadi prioritas dalam memberikan kredit.

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ditinjau dari sudut pandang bank, kredit mempunyai kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber pendanaan dalam membiayai kegiatan usaha yang menitikberatkan sebagai kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas pemberian kredit yang diberikan bank merupakan aset terbesar bagi bank. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan pemberian kredit harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang memadai demi keamanan.

Proses pemberian kredit dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar fasilitas kredit yang diberikan tepat sasaran. Pemberian kredit harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan – kebijakan yang sudah ditetapkan bank. Kebijakan bank tersebut antara lain melakukan penilaian kelayakan terhadap calon debitur. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi termasuk kemungkinan timbulnya kredit macet. Kredit macet merupakan suatu resiko yang biasa terjadi pada bank. Akan tetapi jika kredit yang macet jumlahnya terlalu besar, maka seluruh kegiatan perkreditan dari bank bisa terganggu.

Dalam mencapai keberhasilan visi dan misi yang dijalankan perbankan maka diperlukan pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan sarana untuk membantu bank dalam menerjemahkan dan melaksanakan strategi bank ke dalam perangkat ukuran yang menyeluruh sehingga mampu memberikan kerangka kerja dan menciptakan tolak ukur system manajemen yang strategis terutama dalam penyaluran kredit. Dipilihnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai obyek penelitian karena memiliki jaringan kerja terluas dan terbesar di Indonesia. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Per Desember 2014 ini BRI memiliki 10.396 jaringan kerja operasional yang terdiri 8 jenjang kantor pelayanan, terdiri dari 1 Kantor Pusat, 19 Kantor Wilayah, 461 Kantor Cabang (termasuk 3 Unit Kerja Luar Negeri), 584 Kantor Cabang Pembantu, 971 Kantor Kas, 5.293 BRI Unit, 2.457 Teras BRI, dan 610 Teras BRI Keliling yang kesemuanya terhubung real time online. Bank Rakyat Indonesia menjadi ujung tombak pembangunan perekonomian nasional karena secara konsisten fokus pada pengembangan segmen bisnis usaha mikro, kecil dan menengah sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti bisa memberikan gambaran yang baik sebagai contoh untuk perusahaan penyalur kredit lainnya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu fasilitas kredit usaha kecil dan mikro yang diberikan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). KUR diberikan kepada calon debitur yang memiliki usaha, sehingga kredit yang diberikan diharapkan bisa menjadi modal tambahan usaha yang dilakukan debitur. PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) memberikan Kredit Usaha Rakyat mikro kepada debitur dengan maksimal kredit Rp 25.000.000,- dengan syarat calon debitur memiliki usaha. Adanya rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur. Timbulnya kredit bermasalah selanjutnya dapat mengakibatkan kesulitan dari bank tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada para deposan.

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 masih terdapat kredit macet atau tunggakan kredit yang diberikan kepada debitur, untuk itu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk lebih hati-hati dalam proses pemberian kredit. Berikut disajikan jumlah kredit yang diberikan dan jumlah debitur serta jumlah kredit macet dari kredit usaha kecil dan mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2012-2014 yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Jumlah Kredit Usaha Kecil (Mikro)
yang diberikan dan Jumlah Kredit Macet/ Bermasalah Pada
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2012-2014**

No	Tahun	Jumlah Debitur	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah Kredit Macet (Rp)	% Kredit Macet
1	2012	5.500.000	106.800.000.000.000	1.164.120.000.000	1,09
2	2013	6.500.000	132.100.000.000.000	1.373.840.000.000	1,04
3	2014	7.300.000	153.300.000.000.000	1.716.960.000.000	1,12

Sumber : PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2014

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui dari tahun 2012 ke tahun 2013 jumlah debitur mengalami kenaikan dari 5.500.000 orang menjadi 6.500.000 orang atau dalam persentasenya 18,18 % yaitu bertambah sebanyak 1.000.000 orang debitur. Sedangkan tahun 2013 ke tahun 2014 juga mengalami kenaikan yang semula 6.500.000 orang menjadi 7.300.000 orang atau dalam persentasenya 12,30 % yaitu bertambah sebanyak 800.000 orang debitur. Kredit yang diberikan dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan 23,69% atau sebesar Rp 25.300.000.000.000,-, dan pada tahun 2013 ke tahun 2014 juga mengalami kenaikan 16,04% atau sebesar Rp 21.200.000.000.000,-. Sedangkan kredit macet pada tahun 2012 persentasenya 1,09% , pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1,04% dan kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali menjadi 1,12%. Jika dilihat dari total kredit macet dari tahun 2012 ke tahun 2013 kenaikan kredit macetnya sebesar Rp 209.720.000.000,- atau dalam persentase 18.01%. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 343.120.000.000,- atau dalam persentasenya 24,97%. Meskipun jumlah kredit macet dari kredit modal kerja usaha kecil dan mikro mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2014 yang dikarenakan berbanding lurus dengan kenaikan jumlah debitur serta jumlah pinjaman yang diberikan, akan tetapi tentunya akan mempengaruhi pada pendapatan yang diterima oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Oleh sebab itu bank harus lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit agar kredit macet/tunggakan pinjaman dapat semakin diminimalisir.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa dalam melakukan penilaian pemberian kredit kepada usaha kecil (mikro) kepada debitur, dibutuhkan penerapan sistem pengendalian internal dalam proses tersebut.

Maka penulis akan membahas mengenai :

“ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA MIKRO PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pengendalian internal atas prosedur pelaksanaan pemberian kredit kepada usaha mikro pada PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk ?
2. Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet/bermasalah khususnya kredit usaha mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ?

C. Pembatasan Masalah

Di dalam penyusunan skripsi ini, mengingat luasnya pemeriksaan akuntan dan menyadari keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam penulisan ini maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada prosedur penyaluran kredit usaha mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, unit analisisnya adalah kantor cabang yang beralamat di Jl. Barito No. 2 Pontianak 78123.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal atas prosedur pelaksanaan pemberian kredit kepada usaha mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ?
2. Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet/tunggakan kredit usaha mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ?

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pada prosedur pengendalian internal atas pemberian kredit kepada usaha mikro yang diterapkan oleh perusahaan, rekomendasi yang diberikan oleh penulis dapat menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang ada.

2. Bagi penulis

Penulis dapat menambah wawasan berpikir dan pemahaman mengenai pengendalian internal terhadap pemberian kredit usaha mikro dan sejauh mana teori yang dipelajari dapat diterapkan dalam mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan.

3. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam memahami pengendalian internal terhadap pemberian kredit kepada usaha mikro.

Universitas Tanjungpura